

# **BAB I**

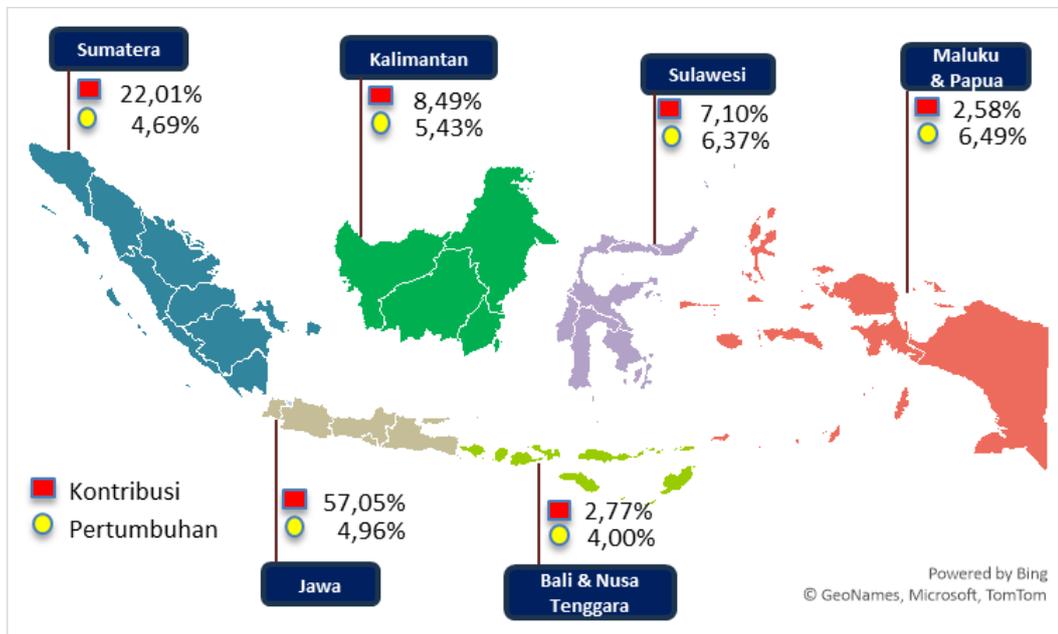
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah fenomena penting dan merupakan serangkaian proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di banyak negara, termasuk negara maju dan negara berkembang. Menurut Todaro & Smith (2006), dalam proses pembangunan masyarakat, terdapat setidaknya tiga tujuan inti yang harus dipertimbangkan. Pertama, meningkatkan ketersediaan serta distribusi berbagai kebutuhan dasar manusia kedua, meningkatkan standar hidup dan ketiga, meningkatkan pilihan sosial dan ekonomi. Indonesia, dengan 34 provinsinya yang memiliki latar belakang yang berbeda, menunjukkan perbedaan yang nyata dalam karakteristik alam, sumber daya alam, ekonomi, dan sosial di setiap wilayahnya. Disparitas ini menjadi kendala terhadap upaya meratakan pembangunan ekonomi karena fokus ekonomi yang terpusat hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi yang memiliki kekayaan alam yang beragam. Meskipun demikian, keragaman alam tersebut juga dapat memberikan nilai tambah yang penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang baik terjadi karena ada faktor-faktor yang mendorong perekonomian pada suatu daerah tersebut. Masing-masing wilayah memiliki ciri khas tersendiri, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebijakan yang dijalankan untuk mengelolanya. Pertumbuhan PDRB sangat bergantung pada kontribusi pada setiap sektor ekonomi. Perencanaan dan perkembangan masing-masing wilayah menyebabkan perbedaan pendapatan di setiap sektor. Semakin tinggi kontribusi sektor-sektor pada PDRB, semakin baik pula pertumbuhannya. Pertumbuhan PDRB pada pulau-pulau yang besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lainnya akan memberi peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara keseluruhan.

Semakin besar dan pesat pertumbuhan PDRB suatu wilayah, semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Satria et al. (2023)



Sumber : Badan Pusat Statistik , Diolah

**Gambar 1.1 Kontribusi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Pulau-Pulau di Indonesia Tahun 2023**

Pada Gambar 1.1 menunjukkan Kontribusi PDRB dan pertumbuhan ekonomi di tiap Pulau di Indonesia tahun 2023. Komposisi perekonomian Indonesia berdasarkan wilayah pada tahun 2023 masih dipengaruhi oleh Pulau Jawa, yang memberikan kontribusi sebesar 57,05 persen dan pertumbuhan 4,96 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera dengan kontribusi 22,01 persen dan pertumbuhan 4,69 persen, Kalimantan dengan kontribusi 8,49 persen dan pertumbuhan 5,43 persen, Sulawesi dengan kontribusi 7,10 persen dan pertumbuhan 6,37 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara dengan kontribusi 2,77 persen dan pertumbuhan 4,00 persen dan terakhir Maluku dan Papua dengan kontribusi 2,58 persen dan pertumbuhan 6,49 persen. Sementara itu, kinerja pertumbuhan ekonomi di semua kelompok pulau pada tahun 2023 tercatat dalam kondisi yang kondusif. Pulau Sumatera untuk kontribusinya terhadap PDRB masih merupakan pulau dengan kontribusi tertinggi setelah Pulau Jawa. Namun, untuk Pertumbuhan Ekonominya Pulau Sumatera masih tergolong cukup rendah dibandingkan dengan Pulau lainnya di Indonesia pada di tahun 2023.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti ketimpangan ekonomi antar sektor, di beberapa daerah mungkin memiliki beberapa sektor yang sangat produktif, seperti industri atau pertambangan, yang berkontribusi besar terhadap PDRB. Namun, sektor lainnya seperti pertanian atau perikanan bisa kurang berkembang. Jika sektor dominan tersebut mengalami stagnasi, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan terlihat rendah meskipun PDRB Nya besar.

Kemudian distribusi kekayaan yang tidak merata, kekayaan yang dihasilkan di suatu daerah mungkin terkonsentrasi pada segelintir individu atau perusahaan besar. Akibatnya, walaupun kontribusi terhadap PDRB besar, sebagian besar penduduk tidak merasakan peningkatan pendapatan atau kesejahteraan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dirasakan rendah. Selanjutnya, ketergantungan pada sektor tertentu jika perekonomian suatu daerah bergantung pada satu atau dua sektor seperti pertambangan atau pariwisata, maka perlambatan atau masalah di sektor-sektor tersebut akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian Infrastruktur dan investasi yang terbatas, kurangnya infrastruktur yang memadai di suatu daerah untuk mendorong pertumbuhan yang merata. Keterbatasan ini dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor baru dan mempersulit perusahaan kecil untuk berkembang. (Wahyuhana et al., 2017)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dikatakan salah satu penyebab yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Penelitian Suswita et al. (2020) juga mengungkapkan bahwa salah satu hambatan bagi pertumbuhan ekonomi adalah kekurangan infrastruktur. Infrastruktur memiliki dampak signifikan dalam memacu perkembangan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai komponen dasar dalam pembangunan, infrastruktur meliputi berbagai aspek, seperti transportasi, energi, air bersih, serta teknologi dan informasi. Keberadaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi, menghubungkan pasar, dan meningkatkan produktivitas. Di samping itu, infrastruktur yang baik secara langsung berkontribusi pada Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses yang lebih baik kepada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. (Awainah et al., 2024)



Sumber: Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN), Data diolah

**Gambar 1.2 Daya Saing Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera dari Tahun 2022-2023**

Pada Gambar 1.1 menunjukkan daya saing infrastruktur tiap provinsi di Pulau Sumatera di tahun 2022-2023. Provinsi yang memiliki indeks daya saing infrastruktur yang tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara yaitu 3,42 persen, kemudian disusul dengan Provinsi Kepulauan Riau dengan 2,99 persen, selanjutnya Provinsi Riau dengan besar 2,88 persen, dan selanjutnya Provinsi Aceh sebesar 2,84 persen, kemudian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,77 persen, selanjutnya Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 2,71 persen, kemudian disusul lagi dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 2,46, selanjutnya Provinsi Lampung sebesar 2,34, lalu selanjutnya Provinsi Bengkulu sebesar 2,11 dan terakhir yang paling rendah yaitu Provinsi Jambi sebesar 2,06 persen pada tahun 2022. Kemudian di tahun berikutnya Provinsi yang dengan indeks daya saing infrastruktur tertinggi masih dipegang oleh Provinsi Sumatera utara dengan besar 3,59 persen dan yang terendah juga masih diduduki oleh Provinsi jambi dengan indeks daya saing infrastruktur sebesar 2,38 persen.

Perbedaan daya saing infrastruktur di tiap daerah disebabkan oleh beberapa faktor seperti, Akses terhadap anggaran dan investasi dimana provinsi dengan

anggaran yang lebih besar atau akses lebih mudah terhadap investasi, baik dari pemerintah pusat maupun swasta, biasanya mampu membangun infrastruktur yang lebih baik, kemudian Perbedaan sumber daya alam dan ekonomi lokal, provinsi yang SDA atau ekonominya lebih kuat cenderung memiliki daya saing infrastruktur yang lebih baik karena pendapatan daerahnya lebih besar dapat dialokasikan untuk pembangunan. Letak geografis dan kondisi geografis di suatu wilayah. Daerah yang secara geografis strategis seperti dekat dengan pusat ekonomi atau pelabuhan, cenderung mendapat prioritas lebih dalam pembangunan infrastruktur sementara daerah dengan kondisi geografis sulit seperti, daerah pegunungan atau yang rentan terhadap bencana alam seringkali menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur. Selanjutnya kapasitas teknis dan manajerial serta ketersediaan teknologi dan inovasi. Suatu daerah yang memiliki SDM yang baik dalam hal perencanaan, manajemen, dan pelaksanaan proyek infrastruktur akan cenderung lebih efisien dalam pembangunan, serta wilayah yang lebih maju dalam penggunaan teknologi dan inovasi akan cenderung memiliki daya saing yang lebih unggul.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Brilyawan & Santosa (2021) bahwa Infrastruktur ekonomi dan sosial memainkan peran vital dalam mempengaruhi PDRB suatu wilayah. Infrastruktur ekonomi seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi merupakan fondasi yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ketersediaan infrastruktur yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan PDRB. Kemudian Pembangunan infrastruktur sosial di sektor pendidikan dan kesehatan turut mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. SDM dengan kualitas tinggi merupakan aset penting bagi pembangunan ekonomi hal ini dikarenakan dapat meningkatkan inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Investasi dalam infrastruktur sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah.

Meskipun Pulau Sumatera memiliki potensi ekonomi yang besar, masih terdapat kesenjangan infrastruktur antar wilayah. Di beberapa daerah, terbatasnya

akses yang memadai terhadap infrastruktur ekonomi dan sosial dapat menjadi penghambat peningkatan produk nasional bruto. Oleh karena itu, penelitian ini menguji sejauh mana infrastruktur ekonomi dan sosial di Pulau Sumatera mempengaruhi PDRB, dan aspek apa saja yang mempengaruhi hubungan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memilih infrastruktur jalan yang diwakilkan oleh jalan mantap, infrastruktur listrik yang diwakilkan oleh kapasitas terpasang pembangkit listrik, infrastruktur kesehatan yang diwakilkan dengan anggaran Dana alokasi khusus fisik (DAK) bidang kesehatan dan infrastruktur pendidikan yang diwakilkan dengan anggaran Dana alokasi khusus fisik (DAK) bidang pendidikan.

Konektivitas antara wilayah menjadi daya tahan momentum pertumbuhan ekonomi, yang mengurangi masalah sosial ekonomi. Peneliti memutuskan untuk mengkaji lebih dalam variabel infrastruktur konektivitas yaitu Jalan dimana kategori jalan yang diambil dalam penelitian ini yaitu Panjang jalan Provinsi yang dalam kondisi mantap. Dengan maksud melihat bagaimana jalan mantap dapat memberi akselerasi pertumbuhan ekonomi, dimana jalan dari sisi ekonomi dengan konektivitas yang mudah akan memacu PDRB. Hal ini dikarenakan juga terdapat penelitian yang menunjukkan adanya hubungan dari kedua hal ini, diantaranya penelitian oleh dengan judul “Pengaruh Infrastruktur Jalan, Tenaga Kerja, dan Investasi terhadap PDRB di Pulau Jawa Tahun 2004-2018” yang menyebutkan bahwa Infrastruktur jalan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap PDRB. Infrastruktur jalan yang baik meningkatkan efisiensi logistik, akses pasar, dan pengurangan biaya transportasi, yang semuanya mendukung pertumbuhan sektor produksi. Selain itu, jalan yang mantap mendukung investasi, konektivitas antar wilayah, dan peningkatan daya saing ekonomi, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan PDRB

Berdasarkan data dari BPS, kondisi Jalan Provinsi dalam kategori mantap di Pulau Sumatera satu tahun terakhir menunjukkan sedikit penurunan dengan panjang 1233,52 km pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1247,27 km. Provinsi dengan rata-rata jalan berkategori mantap tertinggi di Pulau Sumatera selama satu tahun terakhir yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan panjang 2419,98 km, kemudian disusul oleh Provinsi Riau dengan panjang 1818,02

Km, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan panjang 1396,17 km. Sementara itu provinsi dengan rata-rata panjang jalan bergategori mantap yang terendah terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau dengan panjang 724,16 km, kemudian selanjutnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan panjang 780,11 km dan Provinsi Jambi dengan panjang 788,54 km

Kemudian Infrastruktur kedua yaitu listrik, variabel listrik dipilih karena memiliki peran yang penting dalam mendukung sektor produksi, baik industri maupun jasa. Pasokan listrik yang stabil dan efisien akan mengurangi hambatan dalam produksi, meningkatkan produktivitas, dan menarik investasi. Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan PDRB. Maka dari itu perlu pemerataan akses listrik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal seperti yang dikatakan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, (2018), peneliti memutuskan untuk menganalisis variabel listrik yakni kapasitas terpasang pembangkit listrik, yang mana dengan pemerataan akses listrik ke seluruh wilayah, pemerintah dapat memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap energi listrik sehingga, meningkatkan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2019) dengan judul “Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Dalam Pembangunan Daerah” menunjukkan hasil bahwa kapasitas terpasang pembangkit berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Kondisi kapasitas terpasang pembangkit listrik di Pulau Sumatera selama satu tahun terakhir menunjukkan tren positif dimana pada tahun 2022 rata-rata kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 1407,46 mw dan meningkat sebesar 1917,55 mw pada tahun 2023. Kemudian provinsi yang memiliki kapasitas terpasang pembangkit listrik terbesar di Pulau Sumatera pada tahun 2023 adalah Provinsi Sumatera Utara dengan besar 4.703,00 mw, kemudian disusul dengan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4.137,00 mw dan Provinsi Riau sebesar 3.155,00 mw. Sementara itu Provinsi dengan kapasitas terpasang pembangkit listrik terendah pada tahun 2023 yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 466,00 mw,

kemudian Provinsi Bengkulu sebesar 559,00 mw dan Provinsi Jambi sebesar 707,00 mw. (BPS, 2024)

Infrastruktur ketiga yaitu Infrastruktur Kesehatan, Kesehatan adalah kebutuhan vital karena Kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi biaya ekonomi dari penyakit, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Kesehatan juga berperan penting dalam menarik investasi, memperkuat daya saing ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai negara yang masih berkembang, anggaran pemerintah untuk kesehatan tetap sangat dibutuhkan, meskipun layanan kesehatan dari pihak swasta sudah semakin banyak. Melalui pengeluaran negara dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di bidang kesehatan, pemerintah dapat berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai daerah, yang mana tentunya juga dengan adanya lokasi anggaran yang cukup juga penting untuk mendirikan, memperbaiki, dan menjaga fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah. Untuk itu peneliti menggunakan variabel anggaran kesehatan yang diwakili oleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik kesehatan sebagai tolok ukur kualitas infrastruktur kesehatan sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk meningkatkan SDM berkualitas yang mana akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di bidang kesehatan merupakan anggaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan sektor kesehatan. Dana ini dipergunakan untuk menyediakan sarana penunjang kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Tujuannya tidak hanya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, tetapi juga untuk mempercepat penurunan stunting, mengendalikan penyakit, dan memperkuat sistem kesehatan serta memastikan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian, DAK Fisik berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai pendukung alasan dipilihnya variabel tersebut, kajian yang dilakukan oleh (Dju et al., 2023) dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan, Terhadap PDRB dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Kondisi rata-rata jumlah anggaran DAK fisik kesehatan di Pulau Sumatera satu tahun terakhir menunjukkan sedikit penurunan dimana tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 rata-rata jumlah anggaran DAK Fisik kesehatan sebesar Rp. 370.133,13 miliar dan menurun menjadi Rp. 340.945,38 miliar pada tahun 2023. Hal ini bisa disebabkan karena turunnya pagu DAK fisik yang hanya sebesar Rp 53,4 triliun pada tahun 2023, sedangkan pagu alokasi DAK fisik tahun 2022 sebesar Rp. 60,9 triliun. Provinsi dengan rata-rata jumlah anggaran DAK fisik kesehatan tertinggi selama satu tahun terakhir yaitu Provinsi Sumatera utara yaitu sebesar Rp. 687.788,43 miliar, kemudian disusul oleh Provinsi Aceh sebesar Rp. 541.615,76 miliar dan Provinsi Jambi sebesar Rp. 395.606,69 miliar. Sementara itu provinsi dengan rata-rata anggaran DAK fisik kesehatan terendah yaitu Provinsi Lampung sebesar Rp. 149.103,05 miliar, kemudian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 199.271,40 miliar dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 216.534,93 miliar.

Infrastruktur Pendidikan menjadi variabel terakhir yang akan diterapkan pada penelitian ini. Pendidikan adalah kunci penting untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia, karena pendidikan itu bukan hanya tentang menambah pengetahuan dan keterampilan seseorang, tetapi pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja, produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Pendidikan juga dapat membantu mengurangi kemiskinan, mendukung kewirausahaan, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif yang mendorong peningkatan PDRB (Kardina & Magriasti, 2023). Namun, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam memastikan pemerataan pendidikan di daerah pedesaan. Di banyak tempat, akses terhadap fasilitas dan infrastruktur pendidikan masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan pendidikan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. (Maula et al., 2023). Untuk mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan dibutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan pendidikan nasional. Salah

satu dukungan anggaran tersebut yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan.

DAK fisik di bidang pendidikan merupakan dana yang diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu untuk memastikan bahwa setiap sekolah memiliki fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Untuk itu peneliti menggunakan variabel anggaran kesehatan yakni diwakilkan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan sebagai tolok ukur kualitas infrastruktur pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya Pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengelola kekayaan dan sumber daya alam secara efisien, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian negara. (Hardianto, 2017). Sebagai pendukung alasan dipilihnya variabel tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Affandi et al., (2017) dengan judul “Pengaruh Anggaran Pendidikan, Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Aceh” menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berdampak positif dan signifikan pada PDRB.

Kondisi rata-rata jumlah anggaran DAK fisik pendidikan di Pulau Sumatera satu tahun terakhir menunjukkan sedikit penurunan dimana tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 rata-rata jumlah anggaran DAK Fisik pendidikan sebesar Rp. 524.378,73 miliar turun menjadi Rp. 424.348,39 miliar pada tahun 2023. Hal ini bisa disebabkan karena turunnya pagu DAK fisik yang hanya sebesar Rp 53,4 triliun pada tahun 2023, sedangkan pagu alokasi DAK fisik tahun 2022 sebesar Rp. 60,9 triliun. Provinsi dengan rata-rata jumlah anggaran DAK fisik pendidikan tertinggi selama satu tahun terakhir yaitu Provinsi Sumatera utara yaitu sebesar Rp. 683.704,63 miliar, kemudian disusul oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 611.286,79 miliar dan Provinsi Lampung sebesar Rp. 564.913,61 miliar. Sementara itu provinsi dengan rata-rata anggaran DAK fisik pendidikan terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 161.342,18 miliar, kemudian Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 211.969,10 miliar dan Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 304.344,05 miliar.

Dengan Seluruh penjelasan diatas serta adanya prioritas dari pemerintah, oleh karena itu relevan untuk melakukan studi mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi yang tercermin dalam PDRB, dan dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah aspek penting dalam perekonomian karena Infrastruktur yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas, berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan efisiensi sektor-sektor perekonomian. Infrastruktur ekonomi seperti jalan dan listrik akan mempengaruhi peningkatan dalam sektor produksi yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan PDRB. Kemudian infrastruktur sosial seperti kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang mana dapat mempengaruhi peningkatan PDRB. Keberadaan infrastruktur turut menentukan efisiensi dan efektivitas kegiatan perekonomian serta menjadi syarat kelancaran perekonomian. (Intan Suswita et al., 2020).

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang pengaruh infrastruktur ekonomi dan sosial terhadap PDRB, akan tetapi penelitian ini masih relevan dan penting. Hal ini disebabkan oleh pentingnya perhatian terhadap perekonomian, mengingat pengaruhnya yang sangat luas bagi kemajuan ekonomi suatu wilayah, terutama ketika infrastruktur yang tersedia tidak memadai, maka penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga penelitian yang fokus pada pengaruh infrastruktur yang kurang memadai terhadap perekonomian dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih efisien.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi infrastruktur di Pulau Sumatera pada saat ini serta seberapa besar pengaruh infrastruktur ekonomi yang dicerminkan oleh infrastruktur jalan dan listrik, serta infrastruktur sosial yang dicerminkan oleh infrastruktur kesehatan dan pendidikan terhadap perekonomian yang diwakili oleh PDRB di Pulau Sumatera tahun 2015-2023 dengan judul **“Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2023”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi Panjang Jalan Mantap, Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik, Anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan, Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dan PDRB di Pulau Sumatera tahun 2015-2023?
2. Bagaimana Pengaruh Panjang Jalan Mantap, Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik, Anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan, Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan terhadap PDRB di Pulau Sumatera tahun 2015-2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi panjang Jalan Mantap, Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik, Anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan, Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dan PDRB di Pulau Sumatera tahun 2015-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Panjang Jalan Mantap, Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik, Anggaran DAK Fisik Bidang Kesehatan, Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan terhadap PDRB di Pulau Sumatera tahun 2015-2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan referensi Tentang Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap PDRB di Pulau Sumatera tahun 2015-2023.
2. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan dan memperbaiki masalah infrastruktur yang ada di Pulau Sumatera.